

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Harsono, Boedi. *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria*. Bagian3, (Jakarta: ESA Study Club, 1980).
- Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Edisi 2008. (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Kartasapoetra, G. et. Al. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Cetakan ke-2. (Bandung: PT Melton Putra, (1991).
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Parlindungan, A.P. *Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*. (Bandung: Alumni, 1987).
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Prayogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Wipress, 2007).
- R. Soeprpto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*. (Jakarta: CV. Mitra Sari, 1986).
- Rashid, Harun Al. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Edisi ke-2. Cetakan ke-3. (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Surabaya: Arloka, 2003).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-32. (Jakarta: PT. Intermasa, 2005).

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-31. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kompas, 2009).

Supriadi. *Hukum Agraria*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Sutendi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*. (Jakarta: Bina Cipta, 2006).

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-10. (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Wargakusumah, Hasan. *Hukum Agraria I*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kikitir/ Keterangan Obyek Pajak.

JURNAL, MAKALAH, KAMUS, WEB

Anonim. "Tanah". *id.wikipedia.org*, 30 April 2012.

"Hak". *www.kamusbahasaIndonesia.org*, 10 Februari 2010.

"Hak Atas Tanah". *id.wikipedia.org*, 11 April 2011.

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. “Kuasa”. www.bahasa.cs.ui.ac.id, 23 Mei 2012.

Hamdani, Firman. “Korporasi, Negara dan Hukum Agraria”, www.gema-nurani.com, 26 Januari 2012.

